

Berita Utama:

Ketua Pantau e-Audit BPK Pwk DIY

Pada hari Rabu, 10 November 2012 bertempat di ruang Auditorium R Soerasno, Ketua BPK RI Hadi Purnomo didampingi Sekretaris Jenderal BPK RI Hendar Ristriawan menghadiri pemaparan tentang pelaksanaan e-Audit di BPK RI Perwakilan Provinsi DIY. Dalam pemaparannya Kepala Perwakilan Sunarto menyampaikan tahapan Pelaksanaan e-Audit mulai tahap persiapan terdiri dari Penandatanganan Mou, Juknis e-Audit, proses linking dengan entitas dan pembuatan ruang Command Center. Dalam pemaparan tersebut dilakukan simulasi pengambilan data Provinsi DIY yang telah ditarik oleh

Agensi Konsolidator ke Pusat Data di BPK Pusat. Dalam demo yang dilakukan oleh auditor BPK Mohammad Iqbal dilakukan juga simulasi pemanfaatan data elektronik dalam proses audit.

Pemaparan e-Audit tersebut mendapatkan tanggapan dan apresiasi yang sangat positif baik dari Ketua BPK maupun Sekjen BPK. Semangat e-Audit yang ditunjukkan oleh auditor BPK DIY memberikan hal baru bahwa e-Audit benar-benar bisa bermanfaat dalam proses pemeriksaan.

Waka Gelar Kuliah Umum

Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri memberikan kuliah umum pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sebagai salah satu rangkaian acara dalam kegiatan kunjungan Wakil Ketua ke BPK RI Perwakilan Provinsi DIY. Kuliah umum tersebut diberikan di Ruang

Dalam kesempatan tersebut wakil ketua memberikan materi terkait dengan mandat Konstitusional BPK RI. Wakil Ketua membahas secara mendalam kerangka hukum, tugas dan wewenang BPK; Visi, Misi dan Tujuan Strategis BPK serta harapan stakeholder dan masyarakat terhadap BPK RI.

Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Balai Diklat tersebut dibahas beberapa hal terkait dengan materi serta langkah-langkah yang seharusnya ditempuh untuk mewujudkan harapan masyarakat yaitu agar BPK mampu mencegah dan mengungkap korupsi, mampu menghilangkan pungli serta mampu mencegah berbagai praktek tidak sehat di sektor pelayanan publik.

Auditorium R. Soerasno dan dihadiri oleh Inspektur Utama Mahendro Soemardjo, Kepala Balai Diklat DIY Astilda Sinubatar, para pejabat struktural di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi DIY dan Balai Diklat serta para peserta Diklat.

PENANDATANGANAN JUKNIS E-AUDIT



Sebagai tindak lanjut dari Penandatanganan Mou tentang Akses Data secara elektronik (e-Audit) yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2011, pagi hari ini jumat 12 Oktober 2012, bertempat di Gedung Wilis, Kepatihan dilakukan penandatanganan Keputusan Bersama mengenai Juknis Akses Data oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DIY, Sunarto.

Dalam kesempatan tersebut Sunarto menyampaikan bahwa setelah dilakukan IT Assesment oleh Tim e-Audit BPK, saat ini data dari aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) di Provinsi DIY telah terhubung (linking) dengan pusat data BPK. Dengan adanya Juknis ini maka telah diatur prosedur koneksi data, jenis data yang akan diambil, prosedur pengambilan data dan hal – hal lain yang bersifat teknis.

Gubernur DIY menyambut dengan antusias perkembangan ini. Dengan adanya sistem e-Audit ini beliau berharap dapat memacu kedua belah pihak untuk terus mengembangkan dan memperkuat IT masing – masing karena di era keterbukaan ini IT sangat berperan untuk menunjang tata kelola pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.

Selain dengan Pemerintah DIY dilaksanakan juga penandatanganan Juknis e-Audit dengan Pemerintah Kabupaten se-Provinsi DIY yaitu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 11 Oktober 2012; dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 18 Oktober 2012; Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 19 Oktober 2012; Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 31 Oktober 2012 dan yang terakhir dengan Pemerintah Kabupaten Sleman pada tanggal 1 November 2012.

P I C N E W S



Penandatanganan Juknis e-Audit dengan Bupati Gunung Kidul, Badingah (11 Oktober 2012)



Penandatanganan Juknis e-Audit dengan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo (18 Oktober 2012)



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

C N E W S



Penyerahan Juknis e-Audit dari Kepala Perwakilan BPK RI Prov. DIY kepada Wakil Walikota Yogyakarta, Imam Priyono (19 Oktober 2012)



Penandatanganan Juknis e-Audit dengan Bupati Bantul Sri Suryawidati (31 Oktober 2012)



Penandatanganan Juknis e-Audit dengan Bupati Sleman, Sri Purnomo (1 November 2012)



Tim Implementasi e-Audit berfoto bersama Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X



Bersama Wakil Ketua BPK RI bersepeda santai menyusuri route Desa Cangkringan, Sleman (11 Oktober 2012)

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



Bertempat di Halaman Kantor Perwakilan pada tanggal 29 Oktober 2012 seluruh pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi DIY melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-84. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Kepala Perwakilan Sunarto, sedangkan komandan upacara adalah Yan Arsyah.

Dalam sambutan tertulis Menteri Negara Pemuda dan Olahraga yang dibacakan oleh inspektur upacara disampaikan bahwa peringatan sumpah pemuda tahun 2012 ini mengangkat tema “DENGAN SUMPAH PEMUDA, KITA MANTAPKAN KEMANDIRIAN, KREATIVITAS DAN KEBANGSAAN MENUJU KOMUNITAS ASEAN 2015”. Tema tersebut membawa pesan

Hari Sumpah Pemuda

bahwa kita semua, khususnya pemuda, perlu memantapkan tekad untuk terus menerus mempertahankan kemandirian dan kreativitas sembari membangun identitas kebangsaan yang lebih kokoh dan bermartabat.

Amanat Menpora yang dibacakan dalam pidato Kepala Perwakilan juga menjelaskan bahwa pada tahun 2015 telah dicanangkan era Komunitas ASEAN 2015, yang meliputi komunitas keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Era Komunitas ASEAN 2015 tersebut mau tidak mau mengharuskan kita untuk mampu bekerja sama secara terbuka dalam mengelola arus barang, jasa maupun orang, dan menuntut kesiapan kita untuk dapat berkerja sama dengan berbagai komunitas dari berbagai negara ASEAN.

Dalam akhir sambutannya Menpora berpesan agar semangat dan jiwa Sumpah Pemuda terus menjadi inspirasi untuk membangun kesadaran kolektif bangsa guna meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dengan tetap menjaga eksistensi pemuda dalam percaturan global. Pemuda dalam kehidupan global akan tetap menjadi eksis apabila menunjukkan sebuah kapasitas kemandirian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan kreatif dalam berbagai kegiatannya.

UJDIH BPK Jogja Bertahan di Zona Hijau



Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) BPK RI Perwakilan Provinsi DIY yang diwakili oleh Kasubag SDM, Hukum dan Humas Sandra Nursantie menerima penghargaan dalam penilaian kinerja UJDIH Tahun 2011 dalam acara Workshop UJDIH BPK RI di Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 30-31 Oktober 2012. Penilaian kinerja UJDIH tersebut dibagi dalam 3 zona yaitu hijau, kuning dan merah.

Kriteria untuk UJDIH Zona Hijau diantaranya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman JDIH; bekerja sama dengan Pemda dalam penghimpunan Perda; mengunggah Perda, tulisan hukum dan catatan berita; menghimpun Perda dan catatan dalam bentuk hard copy dan/atau soft copy yang berbentuk CD untuk kemudian disampaikan kepada Pemeriksa; membuat tulisan hukum mengenai Perda yang bertentangan dengan Per-Undang - Undangan; dan memberikan laporan kegiatan.

Atas keberhasilan tersebut semakin memacu Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi DIY untuk terus berkarya mempertahankan hasil yang telah dicapai dan mengembangkan UJDIH agar lebih bermanfaat bagi pegawai BPK RI pemeriksa/non pemeriksa pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



Dalam perkembangannya BPK RI Perwakilan Provinsi DIY telah mengalami beberapa kali perubahan wilayah pemeriksaan. Pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keputusan Ketua BPK RI No. 04/SK/K/1981, Kantor Perwakilan di Yogyakarta membidangi pemeriksaan untuk Wilayah II yang meliputi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah pemeriksaan ini kembali berubah dengan ditambahkan Timor Timur ke dalam wilayah pemeriksaan Kantor Perwakilan Yogyakarta berdasarkan surat keputusan No. 80/SK/K/1992.

Dengan dibukanya kantor Perwakilan di Denpasar pada tahun 1996 berdasarkan SK No. 12/SK/K/1996 tanggal 3 Juli 1996, wilayah pemeriksaan untuk Kantor Perwakilan di Yogyakarta meliputi 3 provinsi yaitu Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur

Berdasarkan amandemen UUD 1945 Pasal 23, BPK RI harus mengembangkan kantor perwakilan di semua Provinsi di wilayah Republik Indonesia. Untuk menjalankan amandemen tersebut dibuka secara berturut – turut kantor perwakilan di

BPK RI Perwakilan Prov. DIY

seluruh wilayah Indonesia diantaranya Kantor Perwakilan di Surabaya pada tahun 2005 dan Kantor Perwakilan di Semarang pada tahun 2008.

Hal ini mengakibatkan berubahnya wilayah pemeriksaan Kantor Perwakilan di Yogyakarta menjadi 6 entitas yaitu satu pemerintah provinsi, satu pemerintah kotamadya dan empat pemerintah kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.



Sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01/K/I-XIII.2/1/2009 tentang Nama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Surat Edaran Sekjen Nomor 04/SE/X-XIII.2/5/2009 tentang Penulisan dan Penyebutan Nama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan maka secara resmi BPK RI di Yogyakarta memakai nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Gedung Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jalan Faridan M. Noto No. 6 Kotabaru, Yogyakarta (1969-1985).

Saat ini gedung tersebut menjadi Rumah Dinas Kepala Perwakilan

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features



Jawa Pos, 3 Oktober

Negara merugi 12 Triliun, BPK: 13 ribu
Laporan Keuangan bermasalah

Radar Jogja , 15 Oktober

Temuan BPK, Eksekutif dinilai tidak
serius tanggani parkir parangtritis

Jawa Pos, 4 Oktober

Tidak jelas nasib 133 kasus korupsi.
data BPK, sejak 2003 - 2012, ada 319
temuan berindikasi korupsi, potensi
kerugian negara capai Rp 34,06 triliun.

Tribun Jogja, 16 Oktober

BPK segera serahkan hasil audit Ham-
balang

Jawa Pos 4 Oktober

Pemberian Bonus langgar aturan, Reko-
mendasi BPK : segera kembalikan ke
kas daerah

Tribun Jogja, 19 Oktober

Aneh BPK bisa diintervensi, nama Men-
pora hilang di kasus Hambalang

Tribun Jogja, 8 Oktober

Respon Audit BPK, Direksi Tarik Bonus
Pegawai RSUD P.Senopati Bantul

Jawa Pos, 20 Oktober

Menkeu Sindir Menpora Cuci Tangan,
BPK Revisi Kesimpulan Audit Proyek
Hambalang

Bernas Jogja, 8 Oktober

Berikan bonus karyawan, direksi RSUD
P. Senopati Bantul kena sanksi

Bernas Jogja, 20 Oktober

Andi tahu Hambalang, Audit BPK
diduga diintervensi

Jawa Pos, 9 Oktober

Bikin pembukuan ganda, trik Kepala
Kasda Mojokerto kelabui BPK

Kedaulatan Rakyat, 20 Oktober

Audit BPK dinilai janggal, nama Men-
pora menghilang

Jawa Pos, 11 Oktober

Retribusi Parangtritis menguap, BPK
temukan tidak masuk kas daerah

Kompas, 21 Oktober

Kasus Hambalang, BPK diminta terbuka
dan profesional

Tribun Jogja 15 Oktober

Pemda DIY-BPK jalin kerja sama akses
data e-Audit

Harian Jogja, 31 Oktober

Ketua BPK: Andi Mallarangeng bersalah
dalam proyek Hambalang

Travelling Jogja

Hutan Kali Biru

Jika ingin menikmati keindahan dan se-
garnya udara pegunungan, Alam Hutan
Kemasyarakatan Kalibiru yang berada di
perbukitan Menoreh, Kulonprogo adalah
salah satu pilihan.

Wisata Alam Hutan Kemasyarakatan Kali-
biru berjarak kurang lebih 40 km dari kota
Yogyakarta dan 10 km dari kota Wates,
ibukota Kabupaten Kulonprogo. Lokasi hu-
tan wisata ini dapat dijangkau dengan ken-
daraan roda empat maupun roda dua.

Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam
untuk masuk ke lokasi Hutan Wisata Alam
Kalibiru, karena biaya masuknya yang mu-
rah, Rp. 2.000 per orang, tetapi jika anda
ingin menggunakan fasilitas yang ada
seperti *flying fox*, anda akan dikenakan
biaya Rp. 10.000 untuk dewasa dan Rp.
5.000 untuk anak-anak.

Jika anda datang berombongan dan tertarik
untuk mengadakan kegiatan seperti *out-
ward bound* juga dapat dilakukan di tempat
ini. Ada fasilitas rumah Joglo sebagai tem-
pat pertemuan dan 6 pondok yang dapat
menampung beberapa orang. Juga terdapat
home stay di sekitar lokasi Hutan Wisata
Alam Kalibiru dengan tarif per kamar 30 –
100 ribu rupiah per hari.



Redaksi :

Sunarto, Sigit Hermawan, Sandra Nursantie,
Nina T, Wahyu BD , Pratiwi WA, Kurniawan M, Topan S, Agung K, Y. Dwi R

Alamat Redaksi: :

Jl. HOS Cokroaminoto No.52 Yogyakarta....www.yogyakarta.bpk.go.id....humasdiy@bpk.go.id